

## **BAB II**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

**A.** **Deskripsi** **Provinsi**  
**Riau**

Secara etimologi, kata Riau berasal dari bahasa Portugis, yaitu ‘ Rio’, yang berarti sungai. Riau dirujuk hanya kepada wilayah yang dipertuan mudai oleh Raja Bawah Johor di Pulau Penyengat. Wilayah tersebut kemudian menjadi wilayah Residentie Riouw pemerintah Hindia Belanda yang berkedudukan di Tanjung Pinang; dan Riouw oleh masyarakat setempat dieja menjadi Riau. Daerah Riau ini sendiri merupakan penggabungan dari sejumlah kerajaan Melayu yang pernah berjaya di wilayah ini, yaitu Kerajaan Indragiri pada tahun 1658-1838, Kerajaan Siak Sri Indrapura pada tahun 1723-1858, Kerajaan Pelalawan pada tahun 1530-1879, dan Kerajaan Riau-Lingga pada tahun 1824-1913 dan masih ada beberapa kerajaan kecil lainnya.

Pembangunan Provinsi Riau telah disusun melalui Undang-undang Darurat No 19 tahun 1957 yang kemudian disahkan sebagai Undang-undang No 61 tahun 1958. Provinsi Riau dibangun cukup lama dengan usaha keras dalam kurun waktu hampir 6 tahun sekitar 17 November 1952 s/d 5 Maret 1958. Melalui keputusan Presiden RI pada tanggal 27 Februari tahun 1958, Mr.S.M. Amin ditugaskan sebagai Gubernur KDH Provinsi Riau pertama pada 5 maret 1958 di Tanjung Pinang oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman (Umum, 2013).

## **1. Visi dan Misi Provinsi Riau**

Visi jangka panjang pembangunan Provinsi Riau hingga tahun 2020 merupakan cerminan dari komitmen seluruh masyarakat Riau yang telah disepakati dan ditetapkan berdasarkan perda Provinsi Riau Nomor 36 tahun 2001 tentang pola dasar pembangunan daerah Provinsi Riau 2001-2005, yakni:

**“Terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan batin di kawasan Asia Tenggara tahun 2020”**

Disusunlah visi antara pembangunan jangka menengah lima tahun kedua oleh kepala daerah yang kemudian ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka menengah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2009-2013, yaitu:

**“Terwujudnya pembangunan ekonomi yang mapan dan pengembangan budaya Melayu secara profesional melalui kesiapan Infrastruktur dan peningkatan dalam masyarakat yang agamis”**

Guna melanjutkan visi pembangunan Provinsi Riau diatas, maka disusunlah visi antara pembangunan jangka menengah lima tahun kedua oleh kepala daerah yang kemudian ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka menengah (RPJMD). Sebagai gambaran nyata dari penjabaran misi

pembangunan Riau 2020, perlu adanya visi 5 tahun agar pada tiap tahap periode pembangunan jangka menengah tersebut dapat dicapai secara optimal.

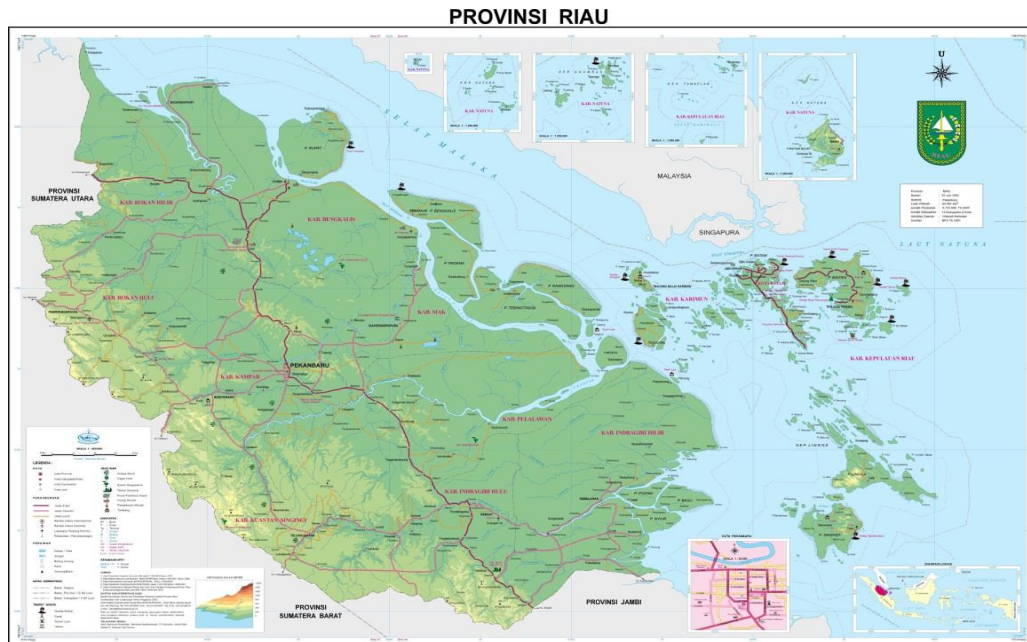
**“Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya Melayudan berdaya saing tinggi, menurunnnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur”**

Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Riau tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembangunan Insfrastruktur.
2. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan.
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan.
4. Menurunkan Kemiskinan.
5. Mewujudkan Pemerintahan yang handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik.
6. Pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa.
7. Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan.
8. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pariwisata.
9. Meningkatkan Peran Swasta dalam Pembangunan.

## 2. Letak Geografis, Luas Wilayah dan Iklim Provinsi Riau

Gambar 2.1 Peta Provinsi Riau



Sumber : (Umum, 2013)

Provinsi Riau secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur yang sangat strategis baik pada masa kini maupun masa yang akan datang karena terletak pada wilayah jalur perdagangan Regional maupun Internasional di Kawasan ASEAN melalui kerjasama IMT-GT dan IMS-GT. Wilayah Provinsi Riau terletak antara 01°05'00'' Lintang Selatan sampai 02°25'00'' Lintang Utara dan 100°00'00'' sampai 105°05'00'' Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut.

Sebelah Utara : Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara

Sebelah Selatan : Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat

Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat

Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka

**Tabel 2.1 Daftar Kabupaten dan Kota Provinsi Riau**

| No                   | Kabupaten/Kota       | Ibu Kota/Kabupaten | Luas (Ha)        | Luas Area (%) |
|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|---------------|
| 1                    | Kuantan Singingi     | Taluk Kuantan      | 520.216          | 5,84          |
| 2                    | Indragiri Hulu       | Rengat             | 767.627          | 8,61          |
| 3                    | Indragiri Hilir      | Tembilahan         | 1.379.837        | 15,48         |
| 4                    | Pelalawan            | Pangkalan Kerinci  | 1.240.414        | 13,91         |
| 5                    | Siak                 | Siak Sri Indrapura | 823.357          | 9,24          |
| 6                    | Kampar               | Bangkinang         | 1.092.820        | 12,26         |
| 7                    | Rokan Hulu           | Pasir Pangaraiyan  | 722.978          | 8,11          |
| 8                    | Bengkalis            | Bengkalis          | 843.720          | 9,46          |
| 9                    | Rokan Hilir          | Bangan Siapi-api   | 896.143          | 10,05         |
| 10                   | Kepulauan<br>Meranti | Selat Panjang      | 360.703          | 4,05          |
| 11                   | Pekanbaru            | Pekanbaru          | 63.301           | 0,71          |
| 12                   | Dumai                | Dumai              | 203.900          | 2,29          |
| <b>Provinsi Riau</b> |                      |                    | <b>8.915.016</b> | <b>100,00</b> |

Sumber : (Umum, 2013)

## **B. Deskripsi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Riau memiliki posisi yang strategis untuk mensukseskan program-program pemerintah karena berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat khususnya di provinsi Riau (*pro poor*). Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan menggerakkan kembali potensi-potensi usaha yang ada (*pro growth*). Keberadaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (*pro job*) serta *pro environment*. Dengan demikian, telah menjadi langkah kongkrit bagi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Riau untuk merealisasikan secara penuh komitmen *Millenium Development Goal* (MDGs) yaitu *Pro Poor*, *Pro Growth*, *Pro Job* dan *Pro Environment*. Jumlah koperasi dan anggota Koperasi di Provinsi Riau posisi 31 Desember 2013. Jumlah Koperasi sebanyak 5.106 unit dan jumlah anggota sebanyak 616.833 orang. Selanjutnya jumlah Usaha Mikro dan Kecil di Provinsi Riau Tahun 2013 sebanyak 525.800 unit (Dinas Koperasi, 2013).

Visi yang dibuat oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Riau adalah “Terwujudnya Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (KUMKM) Provinsi Riau Sehat dan Mandiri Serta Mempunyai Daya Saing”. Misi yang dibuat oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Riau adalah “Memberdayakan

Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (KUMKM) Di Provinsi Riau Yang Berkualitas, Mempunyai Daya Saing Dan Berkelanjutan Di Provinsi Riau”.

Adapun Peraturan yang mengatur UMKM yaitu diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.
2. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 23/PER/M.KUKM/XI/2005 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah NOMOR : 32/Kep/M.KUKM/IV/2003 Tentang Pedoman Penumbuhan Dan Pengembangan Sentra Usaha Kecil Dan Menengah.
3. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : /Per/M.KUKM/VIII/2006 Tentang Pedoman Teknis Bantuan Untuk Teknologi Tepat Guna Kepada Usaha Kecil Dan Menengah Di Sentra.
4. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/VIII/2006 Tentang Pedoman Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Di Kawasan Industri.
5. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 02/Per/M.KUKM/I/2008 Tentang

Pedoman Pemberdayaan Business Development Services-Provider (BDS-P) Untuk Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia.

Berdasarkan dengan adanya data UMKM yang berada di Provinsi Riau yaitu adanya Unit Koperasi dan UMKM yaitu diantaranya adalah :

• **Tabel 2.2 Daftar Jumlah Koperasi dan UMKM di Provinsi Riau tahun 2011-2015**

| NO | KAB / KOTA          | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    |
|----|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | 2                   | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       |
| 1  | PELALAWAN           | 21.300  | 21.548  | 21.633  | 21.633  | 22.260  |
| 2  | INDRAGIRI HILIR     | 54.522  | 54.584  | 54.584  | 54.584  | 56.167  |
| 3  | KAMPAR              | 53.059  | 53.147  | 53.307  | 53.307  | 54.853  |
| 4  | ROKAN HILIR         | 38.686  | 39.319  | 39.319  | 39.319  | 40.459  |
| 5  | S I A K             | 30.994  | 31.157  | 31.183  | 31.183  | 32.087  |
| 6  | KABUPATEN BENGKALIS | 39.300  | 39.406  | 39.573  | 46.727  | 48.082  |
| 7  | MERANTI             | 10.898  | 11.016  | 11.016  | 11.016  | 11.335  |
| 8  | PEKANBARU           | 93.095  | 93.161  | 93.161  | 93.161  | 95.863  |
| 9  | KUANTAN SINGINGI    | 28.735  | 29.088  | 29.088  | 30.410  | 31.292  |
| 10 | D U M A I           | 39.398  | 39.497  | 45.135  | 45.363  | 46.678  |
| 11 | INDRAGIRI HULU      | 36.280  | 36.322  | 71.757  | 71.757  | 73.838  |
| 12 | ROKAN HULU          | 35.926  | 36.044  | 36.044  | 36.044  | 37.089  |
|    | TOTAL               | 482.193 | 484.289 | 525.800 | 534.504 | 550.003 |

- Sumber Data : (Dinas Koperasi, 2013)



### **C. Deskripsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Riau**

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. Selain memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik LPSE juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan

Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Dasar hukum pembentukan LPSE adalah Pasal 111 Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. LPSE dalam menyelenggarakan sistem

pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) saat ini adalah e-tendering yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering. Selain itu LKPP juga menyediakan fasilitas Katalog Elektronik (*e-Catalogue*) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah, proses audit secara online (*e-Audit*), dan tata cara pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik (*e-Purchasing*). SPSE merupakan aplikasi *e-procurement* yang dikembangkan oleh Direktorat e-Procurement - LKPP untuk digunakan oleh LPSE di seluruh K/L/D/I. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan biaya lisensi, baik lisensi SPSE itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya.

**Tabel 2.3 Rasio Paket Lelang Melalui *E-Procurement* Tahun 2011-2015**

|  | 2011 | 2012  | 2013 | 2014 | 2015 | Rata-Rata |
|--|------|-------|------|------|------|-----------|
| <b>Jumlah Paket E-Procurement</b>                                | 77   | 77    | 77   | 77   | 77   | 77        |
| <b>Rerata / Paket (Jumlah Anggaran/Paket)</b>                    | 6,00 | 13,00 | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 5,4       |
| <b>Rerata Peserta</b>  | 20   | 23    | 43   | 53   | 63   | 40,4      |
| <b>Peserta Total Seluruh Paket</b>                               | 491  | 831   | 1020 | 1107 | 1334 | 956,6     |
| <b>Jumlah Paket Pemenang dari Daerah</b>                         | 73   | 37    | 64   | 73   | 67   | 62,8      |
| <b>Jumlah Paket Pemenang dari Luar Daeah</b>                     | 9    | 16    | 13   | 3    | 5    | 9,2       |
| <b>Presentase Pemenang dari Daerah</b>                           | 93%  | 63%   | 67%  | 95%  | 92%  | 82%       |
| <b>Presentase Pemenang dari Luar Daerah</b>                      | 7%   | 37%   | 33%  | 5%   | 8%   | 18%       |
| <b>Tingkat Kompetitif ( jumlah paket dibagi peserta lelang )</b> | 36%  | 18%   | 14%  | 8%   | 7%   | 17%       |

\*Sumber Data Hasil Olahan Data Melalui Website LPSE Provinsi Riau

Berdasarkan hasil pada Tabel 2.3 ini penulis mengambil sampling data sebagai berikut :

**Tabel 2.4 Rasio jumlah Responden UMKM di Provinsi Riau yang mengikuti *e-procurement* Tahun 2011-2015**

| No | Jenis Paket/<br>Jumlah Keseluruhan setelah di ambil sampel 17% | Jenis UMKM     | Kriteria Nilai Usaha             | Jumlah Pemenang berasal dari Perusahaan UMKM Lokal |      |      |      |      | Rata-rata |
|----|--|----------------|----------------------------------|--|------|------|------|------|-----------|
|    |  |                |                                  | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |           |
| 1  | Pengadaan Barang/ 28   | Usaha Mikro    | < Rp.300 juta                    | 10   | 5    | 12   | 12   | 17   | 11        |
|    |  | Usaha Kecil    | > Rp. 300 juta - Rp. 2,5 Milyar  | 18   | 15   | 12   | 15   | 8    | 14        |
|    |  | Usaha Menengah | > Rp. 2,5 Milyar - Rp. 50 Milyar | 0  | 8    | 8    | 1    | 3    | 5         |

\*> : Lebih Besar Dari, < : Lebih Kecil Dari

| No                                  | Jenis Paket/<br>Jumlah<br>Keseluruhan<br>setelah di ambil<br>sampel | Jenis<br>UMKM     | Kriteria<br>Nilai Usaha                   | Jumlah Pemenang berasal dari<br>Perusahaan UMKM Lokal |      |      |      |      | Rata<br>-rata |
|-------------------------------------|---|-------------------|---|---|------|------|------|------|---------------|
|                                     |   |                   |   | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |               |
| 2                                   | Pengadaan<br>Konstruksi/35  | Usaha<br>Mikro    | < Rp.300<br>juta                          | 7   | 11   | 3    | 4    | 9    | 7             |
|                                     |   | Usaha<br>Kecil    | > Rp. 300<br>juta - Rp.<br>2,5 Milyar     | 26  | 15   | 28   | 10   | 23   | 20            |
|                                     |   | Usaha<br>Menengah | > Rp. 2,5<br>Milyar -<br>Rp. 50<br>Milyar | 2   | 7    | 4    | 21   | 3    | 7             |
| 3                                   | Jasa<br>Konsultansi<br>Badan Usaha/<br>9                            | Usaha<br>Mikro    | < Rp.300<br>juta                          | 2   | 6    | 3    | 6    | 9    | 5             |
|                                     |   | Usaha<br>Kecil    | > Rp. 300<br>juta - Rp.<br>2,5 Milyar     | 6   | 3    | 6    | 3    | 0    | 4             |
|                                     |   | Usaha<br>Menengah | > Rp. 2,5<br>Milyar -<br>Rp. 50<br>Milyar | 1   | 0    | 0    | 0    | 0    | 1             |
| 4                                   | Jasa Lainnya/<br>5  | Usaha<br>Mikro    | < Rp.300<br>juta                          | 2   | 1    | 0    | 4    | 1    | 2             |
|                                     |   | Usaha<br>Kecil    | > Rp. 300<br>juta - Rp.<br>2,5 Milyar     | 3   | 1    | 5    | 1    | 4    | 3             |
|                                     |   | Usaha<br>Menengah | > Rp. 2,5<br>Milyar -<br>Rp. 50<br>Milyar | 0   | 3    | 0    | 0    | 0    | 3             |
| <b>Total Rata-rata Sample/tahun</b> |   |                   |   | 6   | 6    | 7    | 6    | 6    | 7             |

\*> : Lebih Besar Dari, < : Lebih Kecil Dari